



Warga ramai mengunjungi Monumen Pancasila Sakti, salah satu tempat untuk mengenang jasa pahlawan dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober dan berkaitan dengan peristiwa G30S, Selasa (1/10/2024). (Ist)



# Ekonomi Lesu Darah, Deflasi RI Terparah

**D**arah yang mengalir di tubuh layaknya uang di dalam perekonomian sebuah negara. Kurangnya darah akan membuat seluruh tubuh menjadi lesu. Demikian juga dengan perekonomian, saat daya beli stagnan bahkan cenderung lemah maka ekonomi pun lesu darah. Gejala tersebut tampak pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat deflasi sebesar 0,12% pada September 2024. Angka deflasi ini lebih dalam dibandingkan deflasi Agustus 2024 yang tercatat 0,03% secara bulanan. Bahkan deflasi beruntun dalam 5 bulan ini, menjadi terparah dalam 5 tahun terakhir. Bahkan ekonom menyebut, kondisi saat ini serupa dengan keadaan pasca krisis moneter atau krismon pada 1998-1999, meskipun pemicunya berbeda. Kendati BPS menunjuk penyebab deflasi adalah karena penurunan harga beberapa komoditas pangan bergejolak karena panen, tapi terjadinya deflasi hingga lima bulan beruntun menuai tanya di tengah kondisi manufaktur berkontraksi lagi untuk bulan ketiga dan gelombang PHK yang masih besar. S&P Global melaporkan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia pada September bernilai 49,2. Sedikit naik dibandingkan Agustus yang sebesar 48,9, namun masih berada di zona kontraksi. Di sisi lain, jumlah PHK selama 8 bulan terakhir tahun ini, naik 23,7% dibanding periode yang sama tahun lalu. Duh.

**GOVERNMENT (Hal.2)**  
10 Nama Lolos  
Capim KPK Sudah  
di Tangan Jokowi

## INFLANSI/DEFLASI BULANAN INDONESIA PADA TAHUN 2024

SUMBER : BPS



Baca Hal 11...

# 10 Nama Lolos Capim KPK Sudah di Tangan Jokowi

**JAKARTA** - Panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) dan calon Dewas (Cadewas) KPK telah rampung melaksanakan tes wawancara dan kesehatan bagi masing-masing 20 orang Capim dan Cadewas KPK.

Setelah menggelar tahapan tersebut beberapa waktu lalu, Pansel KPK pun telah menyaring masing-masing 10 nama Capim dan Cadewas KPK yang diserahkan ke Presiden Jokowi siang tadi, Selasa (1/10/2024).

Dari daftar 10 besar tersebut, tak ada nama eks juru bicara KPK Johan Budi yang lolos seleksi wawancara. Artinya, Johan Budi gagal.

Begitu juga dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, tidak lolos.

Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria, mengungkapkan kriteria utama yang digunakan dalam menentukan para calon yang lolos tersebut.

"Bahwa kriteria yang kita tetapkan dalam memilih Capim dan Cadewas ini adalah, satu integritas, dua kapabilitas, tiga adalah akseptabilitas. Jadi reputasi dan kemudian kepercayaan publik juga menjadi salah satu pertimbangan dalam kami menentukan," kata Arif saat konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (1/10/2024).

Proses penetapan kriteria tersebut, lanjutnya, tidak hanya berdasarkan pertimbangan internal Pansel KPK, tetapi juga melibatkan masukan dari berbagai kalangan.

Mulai dari akademisi, pebisnis, hingga organisasi masyarakat sipil (CSO), semuanya diundang untuk memberikan pandangan mengenai sosok ideal yang diperlukan untuk menjadi pimpinan dan Dewas KPK.

Selain mempertimbangkan kriteria utama, Pansel juga memperhatikan rekam jejak para calon melalui masukan dari berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menilai. Menurut Arief, masukan dari masyarakat juga menjadi salah satu komponen penting yang tidak diabaikan dalam proses seleksi.

Sementara, Mertua Komika Kiky Saputri, Gusrizal lolos dalam seleksi calon dewan pengawas KPK. Lalu, Ketua Harian Kompolnas Benny Jozua Mamoto juga masuk dalam daftar



Pansel Capim dan Dewas KPK berfoto bersama usai menyerahkan nama-nama ke Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Selasa (1/10/2024). Dok. Setpres RI

nama yang diserahkan kepada Jokowi. Nama-nama lain yang lolos yakni Christa Mirawati, Elly Fariani, Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, Iskandar MZ, Mirwazi, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.

Presiden Jokowi membenarkan telah menerima dokumen hasil seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas pada hari ini Selasa (1/10) di Base Off Lanud Halim Perdana Kusuma.

"Pada hari ini, Selasa, 1 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB, Bapak Presiden telah menerima Panitia Seleksi Capim KPK dan Calon Dewas KPK di Ruang Holding, Base Off Lanud Halim Perdana Kusuma," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Selasa (1/10/2024).

"Pada kesempatan itu, Pansel menyerahkan dokumen tentang hasil seleksi Capim KPK dan Calon Dewas KPK," sambungannya.

## 'Ora et Labora'

Terpisah, Anggota Komisioner Kompolnas Poengky Indarti masuk dalam daftar 10 nama yang lolos Capim dan Cadewas KPK yang diserahkan panitia seleksi (pansel) ke Presiden Jokowi siang tadi, Selasa (1/10).

Terkait hal itu, Poengky menyampaikan rasa syukurnya. "Terima kasih banyak. Amin YRA," kata Poengky saat dihubungi.

Saat ditanya lebih lanjut terkait persiapannya ke depan, Poengky mengirim ucapan 'Ora et Labora'.

Ora et Labora sendiri memiliki makna berdoa dan bekerja. Ini juga sebuah pepatah yang sering digunakan untuk menekankan pentingnya bekerja keras dan mempercayakan hasilnya kepada Tuhan.

"Ora et Labora," lanjutnya.

Poengky Indarti adalah Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang menjabat 2 periode yakni 2016 - 2020 dan 2020-2024. Dia juga satu-satunya perempuan dari 9 anggota Kompolnas, yang bertugas sebagai Pengawas Fungsional Polri.

Perempuan kelahiran Surabaya, 18 Februari 1970 ini adalah Master of Law lulusan Northwestern University Chicago. Ia sebelumnya aktif sebagai aktivis HAM di LBH Surabaya (1991-2000), YLBHI (2000), KontraS (2001-2003), dan Imparsial (2003-2015).

Di level internasional, Poengky juga pernah menjadi Ketua Board INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) pada tahun 2005-2008, dan Anggota Executive Committee Asia Forum for Human Rights (FORUM-ASIA) pada tahun 2009-2012.

Saat ini Poengky tercatat sebagai Visiting Research Fellow di Jeonbuk National University Institute for Southeast Asian Studies (JISEAS) - Korea Selatan. (wid,rls,ist/dya)

## Capim KPK yang Memasuki Tahapan Akhir Seleksi



**1. Agus Joko Pramono**  
Agus Joko Pramono dikenal sebagai Wakil Ketua BPK periode 2019-2023. Agus juga dikenal sebagai guru besar akuntansi publik di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Ia juga merupakan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.



**2. Ahmad Alamsyah Saragih**  
Alamsyah Saragih dikenal Anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016-2020.



**3. Djoko Poerwanto**  
Irjen Djoko pernah menjadi Kasubdit II Tipikor Bareskrim. Ia juga sempat ditugaskan menjadi penyidik KPK. Ia selanjutnya menjadi Kapolda NTB. Kemudian pada 2023, Irjen Djoko menjabat sebagai Kapolda Kalteng.



**4. Fitroh Rohcahyanto**  
Pernah menjadi Direktur Penuntutan (Dirtut) KPK. Jejak penuntutan Fitroh juga terdapat dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Usai menjabat selama 11 tahun di KPK, ia kembali ke Kejaksaan Agung (Kejagung).



**5. Ibnu Basuki Widodo**  
Ibnu Basuki Widodo hakim di Pengadilan Tinggi Manado.



**6. Ida Budhiati**  
Mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Ida juga pernah menjabat sebagai anggota KPU Jawa Tengah.



**7. Johanis Tanak**  
Merupakan Wakil Ketua KPK yang menggantikan Lili Pintauli. Johanis Tanak memiliki latar belakang sebagai jaksa.



**8. Michael Rolandi Cesnanta Brata**  
Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI. Kini, ia menjabat sebagai Komisaris PT Bank DKI sejak 14 Desember 2022.



**9. Poengky Indarti**  
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2020-2024. Ia juga ikut mendirikan Imparsial The Indonesian Human Right Monitor (Imparsial). Anggota Kompolnas ini juga dikenal sebagai Dewan Pakar Hoegeng Awards 2023 dan 2024.



**10. Setyo Budiyo**  
Mantan Kapolda Sulawesi Utara menggantikan Irjen Mulyatno. Selanjutnya pati Itwasum Polri ini ditugaskan di Kementerian Pertanian dan ia pun naik pangkat menjadi Komjen.

# Duduki Kursi Ketua DPR Lagi, Puan Janji Kawal Kedaulatan Pangan hingga Ketimpangan

## DAFTAR PIMPINAN FRAKSI DPR PERIODE 2024-2029



**PDIP**  
- Jumlah anggota 110 orang.  
- Susunan fraksi belum disampaikan.



**Golkar**  
- Jumlah anggota 102 orang.  
- Ketua fraksi: Muhammad Samruji.  
- Sekretaris: Mukhtarudin.  
- Bendahara: Sari Yulianti.



**Gerindra**  
- Jumlah anggota 86 orang.  
- Ketua Fraksi: Budisatrio Djiwandono  
- Sekretaris: Bambang Haryadi  
- Bendahara: Novita Wijayati



**NasDem**  
- Jumlah anggota 68 orang.  
- Ketua Fraksi: Victor Laiskodat  
- Sekretaris: Ahmad Sahroni  
- Bendahara: Nafa Urbach



**PKB**  
- Jumlah anggota 69 orang  
- Ketua Fraksi: Jazilul Fawaid  
- Sekretaris: Anggia  
- Bendahara: Muhammad Rano Alfath



**PKS**  
- Jumlah anggota 53 orang  
- Penasihat Fraksi: Hidayat Nur Wahid, Ahmad Heryawan dan Sohibul Iman.  
- Pimpinan Fraksi: Jazuli Juwaini.  
- Wakil Pimpinan Fraksi: Sukamta, Amin, Netty Prasetyani, Awal Muharram, Adang Darajatun  
- Sekretaris: Ledia Hanifah  
- Wakil Sekretaris: Habib Idrus Salim  
- Bendahara: Kurniasih  
- Wakil bendahara: Ismail



**PAN**  
- Jumlah anggota 48 orang.  
- Belum menyampaikan susunan fraksi



**Demokrat**  
- Jumlah anggota 44 orang.  
- Ketua Fraksi: Eddy Baskoro Yudhoyono



Anggota DPD terpilih masa bakti 2024-2029 Alfiansyah alias Komeng sempat berswafoto saat dilantik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Ist)

2025 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) akan memimpin DPR periode 2024-2029 bersama 4 wakil ketua. Empat Wakil Ketua DPR tersebut adalah Adies Kadir (Fraksi Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Saan Mustofa (Fraksi NasDem), dan Cucun Ahmad Syamsurijal (Fraksi PKB).

"Menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seluruh anggota DPR RI, untuk dapat menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya," ujar Puan.

Mantan menko PMK ini pun menyoroti berbagai tantangan dalam membangun Indonesia. Menurut Puan, terdapat sejumlah permasalahan struktural yang harus diselesaikan.

"Antara lain masalah struktural kualitas Sumber Daya Manusia, kedaulatan pangan, energi, industri nasional, UMKM, ketimpangan sosial, kemiskinan, dan lain sebagainya," ungkapnya.

Puan menambahkan, Indonesia juga tengah juga menghadapi ketidakpastian gejolak ekonomi global dan geopolitik global, hingga perekonomian nasional yang masih dalam pemulihan. DPR RI melalui fungsi-fungsi konstitusionalnya disebut harus melakukan intervensi.

"Yaitu dengan kebijakan negara dalam Politik Hukum, Politik Anggaran dan Politik Pembangunan, untuk merespon berbagai tantangan di dalam membangun Indonesia," tegas Puan. Puan mengingatkan, alat kelengkapan dewan (AKD) DPR baik komisi dan badan memiliki tugas tertentu dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi. Ia kemudian merinci agenda DPR ke depan secara umum.

Untuk agenda legislasi, DPR RI bersama pemerintah memiliki tugas membentuk Undang Undang yang dapat mengatur kehidupan rakyat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, religi, dan lain sebagainya. Puan menyatakan, DPR dan

Pemerintah nantinya akan menyusun Program Legislasi Nasional, yaitu Undang Undang prioritas 5 (lima) tahun ke depan.

"Kita dan Pemerintah dalam membentuk Undang Undang diharapkan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, mengatur kemudahan-kemudahan dalam urusan rakyat," jelasnya.

Sementara itu pada agenda dalam menjalankan fungsi Anggaran, DPR berkewajiban memastikan kebijakan dan program pada APBN agar dapat berjalan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. DPR juga bertugas menjalankan pembangunan di segala bidang dan pemerataan pembangunan di daerah.

"Terhadap perubahan-perubahan kementerian di Pemerintahan, DPR RI sesuai Undang Undang APBN Tahun Anggaran 2025, bersama pemerintah akan kembali membahas perubahan dan penyesuaian program dan kementerian," terang Puan.

DPR pun memiliki tugas dalam hal fungsi pengawasan atas kinerja pemerintahan dan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan UU. Menurut Puan, tugas ini akan diarahkan demi menjamin peningkatan kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam menangani berbagai urusan rakyat.

"(Agar) Semua urusan rakyat menjadi mudah: kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan, transportasi, dan lain sebagainya sehingga hidup rakyat semakin sejahtera," urainya.

Di sisi lain, Puan mengingatkan anggota DPR agar dalam kerjanya harus mengutamakan kerja bersama, dan gotong royong. Sebab seorang anggota DPR tidak mungkin bekerja sendiri.

"Pengambilan keputusan kebijakan negara tidak mungkin diputuskan sendiri. Kita harus bersama dengan Anggota DPR RI lainnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan

peran diplomasi," kata Puan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus anggota DPR RI periode 2024-2029 Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyebut ada wacana jumlah komisi di DPR bertambah dari 11 menjadi 13 komisi.

"Ada wacana bahwa katanya dari 11 komisi yang ada menjadi 13 komisi," kata Eko saat ditemui usai Pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR Periode 2024-2029 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Menurut Eko, penambahan komisi mengingat kemungkinan bertambahnya nomenklatur kementerian/ lembaga di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun begitu, dia mengaku belum tahu bentuk pecahan komisi tersebut.

"Bisa aja misalnya begini, hukum dan HAM, mungkin bisa jadi hukum di komisi berapa, HAM-nya di komisi berapa, atau misalnya menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, pariwisata di mana, ekonomi kreatifnya apakah berbentuk kementerian atau berbentuk badan," ujar Eko.

### PR Besar Menanti

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi oleh para wakil rakyat, khususnya terkait dengan regulasi politik.

Ujang menyatakan menjaga stabilitas dan konsistensi dalam regulasi politik Indonesia menjadi pekerjaan rumah (PR) utama bagi DPR yang baru. Mereka perlu merancang undang-undang yang tidak hanya relevan untuk jangka pendek, tetapi juga tahan lama agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan politik di masa depan.

"Agar ke depan tidak ada perubahan undang-undang setiap kali pemilu, atau setiap ada hajatan politik tertentu. Jangan membuat undang-undang seperti mengganti popok bayi, sekali pakai lalu dibuang. Regulasi harus memiliki dimensi jangka panjang," ujar Ujang.

Ujang juga menambahkan pentingnya integrasi antara berbagai undang-undang politik. Menurutnya, sering kali undang-undang dibuat secara terpisah tanpa memperhatikan keterkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga berpotensi menimbulkan benturan aturan.

"Di bidang politik, kita memiliki undang-undang tentang partai politik, pilkada, dan pemilu. Undang-undang ini harus benar-benar terintegrasi agar saling mendukung dan tidak bertentangan," jelas Ujang. (wid,rls,ist,ant/dya)

**JAKARTA**-Puan Maharani yang terpilih kembali sebagai Ketua DPR RI menyebut DPR RI periode 2024-2029 siap mengawal sejumlah permasalahan pembangunan nasional. Mulai dari isu kedaulatan pangan hingga ketimpangan sosial.

"Setiap Pemilu selesai dilaksanakan dan rakyat telah memilih wakil-wakilnya, maka selalu disertai dengan harapan rakyat bahwa ke depan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada kita, anggota DPR RI, dapat digunakan untuk mengubah kehidupan rakyat yang semakin sejahtera," kata Puan dalam pidatonya dalam rapat paripurna usai dilantik sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029, Selasa (1/10/2024).

Sebelumnya, pelantikan pimpinan DPR masa bakti 2024-2029 digelar dalam Rapat Paripurna pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-

# Beda Pandangan MUI dan Kemenag soal 'Tuyul' dan 'Wine' Dapat Sertifikat Halal

**JAKARTA**-Sejumlah merek minuman dengan nama 'tuyul', 'tuak', 'beer' dan 'wine' mendapat sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan, nama-nama produk tersebut tak dibenarkan sesuai standar fatwa MUI. Karenanya MUI menegaskan tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan terhadap produk-produk tersebut.

Pandangan berbeda dikatakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag).

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag Mamat Salamat Burhanudin menjelaskan persoalan tersebut hanya masalah penamaan produk. Ia memastikan kandungan produk-produk itu halal.

"Artinya masyarakat tidak perlu ragu bahwa produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya. Karena telah melalui proses sertifikasi halal dan mendapatkan penetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku," kata Mamat dalam keterangannya, Selasa (1/9/2024).

Mamat mengatakan penamaan produk halal sebetulnya sudah diatur oleh regulasi melalui SNI 99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal dan Fatwa MUI Nomor 44 tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

Peraturan tersebut, lanjutnya, menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk dengan nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan etika yang berlaku di masyarakat.

Meski begitu, Mamat mengatakan pada kenyataannya masih ada nama-nama produk tersebut mendapatkan sertifikat halal, baik yang ditetapkan halalnya dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal.

"Hal ini terjadi karena masing-masing memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait penamaan produk. Hal ini dibuktikan dengan data kami di Sihalah," ujarnya.

Mamat kemudian mencontohkan produk dengan nama menggunakan kata "wine" yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 61 produk. Sementara Komite Fatwa menetapkan 53 produk sertifikat halalnya dengan nama tersebut.



Petugas melayani pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal di Rangkasbitung, Lebak, Banten, (ANTARA)

"Produk dengan nama menggunakan kata "beer" yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 8 produk. Dan 14 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa," katanya.

Mamat menjelaskan data tersebut mencerminkan fakta adanya perbedaan pendapat di antara ulama mengenai penamaan produk dalam proses sertifikasi halal.

Perbedaan itu pun sebatas soal diperbolehkan atau tidaknya penggunaan nama-nama yang dinilai tidak patut tersebut.

"Tidak terkait dengan aspek kehalalan zat dan prosesnya yang memang telah dipastikan halal," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Dzikro mengajak semua pihak untuk duduk bersama, berdiskusi, dan menyamakan persepsi agar tidak timbul kegaduhan di tengah masyarakat terkait nama-nama produk.

"Sehingga masyarakat tidak ragu untuk mengonsumsi produk-produk bersertifikat halal karena telah terjamin kehalalannya," kata Dzikro.

Sebelumnya pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) menemukan produk pangan dengan nama tuyul, tuak, beer, serta wine mendapat sertifikat halal BPJPH Kementerian Agama.

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengatakan temuan ini merespon laporan masyarakat sehingga MUI melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan pengecekan.

Asrorun menjelaskan nama-nama produk tersebut tak dibenarkan sesuai standar fatwa MUI. Karenanya MUI tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan terhadap produk-produk tersebut.

"Dari hasil investigasi dan pendalaman, terkonfirmasi bahwa informasi tersebut valid, produk-produk tersebut memperoleh Sertifikat Halal dari BPJPH melalui jalur self declare, tanpa melalui audit Lembaga Pemeriksa Halal, dan tanpa penetapan kehalalan melalui Komisi Fatwa MUI," kata Asrorun dalam keterangannya.

Asrorun menjelaskan nama-nama produk tersebut tak dibenarkan sesuai standar fatwa MUI. Karenanya MUI menegaskan tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan terhadap produk-produk tersebut.

Lebih lanjut, Asrorun menjelaskan diperoleh informasi bahwa produk tersebut valid, punya bukti jelas terpampang dalam situs BPJPH, dan diarsipkan oleh pelapor.

Namun, belakangan nama-nama produk tersebut tidak muncul lagi di aplikasi BPJPH.

Ia mengaku akan segera koordinasi dengan BPJPH Kemenag untuk mencari jalan keluar terbaik agar kasus serupa tidak terulang.

"Sementara penerbitan Sertifikat Halal terhadap produk-produk tersebut, tidak melalui MUI dan menyalahi fatwa MUI tentang standar halal," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda menjelaskan sertifikasi halal melalui self declare mengandung kerawanan, karena itu harus hati-hati sekali.

"Pihak-pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, lebih khusus melalui self declare harus berhati-hati dan ekstra teliti, serta mematuhi standar halal yang berlaku. Harus benar-benar memastikan bahwa produk tersebut merupakan produk yang sudah jelas kehalalannya dan proses produksi sederhana. Juga harus memperhatikan titik-titik kritis dalam proses halal," ujar Huda.

## Ketentuan untuk produk yang bisa dapat sertifikat halal versi MUI

**Fatwa Nomor 44 tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.**

1. Produk yang menggunakan nama dan/atau simbol-simbol kekhufuran, kemaksiatan, dan/atau berkonotasi negatif;
2. Produk yang menggunakan nama benda/hewan yang diharamkan, kecuali: a. yang telah mentradisi ('urf) yang dipastikan tidak mengandung bahan yang diharamkan; b. yang menurut pandangan umum tidak ada kekhawatiran adanya penafsiran kebolehan mengonsumsi hewan yang diharamkan tersebut. c. yang mempunyai makna lain yang relevan dan secara empirik telah digunakan secara umum.
3. Produk yang berbentuk babi dan anjing dengan berbagai desainnya;
4. Produk yang menggunakan kemasan bergambar babi dan anjing sebagai fokus utama;
5. Produk yang memiliki rasa/aroma (flavour) unsur benda atau hewan yang diharamkan;
6. Produk yang menggunakan kemasan yang berbentuk dan/atau bergambar erotis dan porno.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Halal, ada empat kriteria penggunaan nama dan bahan. Di antaranya tidak boleh menggunakan nama dan/atau simbol makanan dan/atau minuman yang mengarah kepada kekhufuran dan kebatilan. (wid,rls,ist,ant/dya)

## Seksi Konservasi Kelautan Cabang DKP Situbondo

# Monitoring Ekosistem Mangrove di Desa Mertajasah Bangkalan

**BANGKALAN-** Seksi Konservasi Kelautan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Situbondo melaksanakan monitoring ekosistem mangrove dan Ground Check Kesesuaian Kondisi Eksisting Mangrove. Kegiatan pada hari Senin, 9 September 2024 itu bertempat di Desa Mertajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

Monitoring tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi mangrove eksisting yang tumbuh alami dan hasil rehabilitasi yang dilakukan oleh Masyarakat. Selain itu juga memeriksa kesesuaian hasil pemetaan yang dilakukan oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.

Potensi mangrove di Desa Mertajasah sangat luas kondisi baik. Beberapa jenis yang ditemukan antara lain *Sonneratia alba*, *Avicennia marina*, *Avicennia alba*, *Bruguiera* spp, *Aegiceras floridum*, dan *Rizophora* spp.

Selain ditemukan beberapa jenis mangrove alami, pokmaswas juga melakukan pembibitan mangrove jenis *Sonneratia alba* dan *Rizophora* spp. sebagai upaya untuk menambah tutupan mangrove.

Hasil monitoring penanaman mangrove dari kegiatan pembinaan mitigasi bencana di wilayah pesisir pada waktu yang lalu, mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Tinggi mangrove rata-rata 40-50 cm dengan jumlah daun 6-8 helai.



Pertumbuhan mangrove juga didukung oleh jenis substrat yang baik yaitu bisa tumbuh optimal pada substrat berlumpur, serta hama tiram yang tidak terlalu banyak. Biota asosiasi yang berada di ekosistem mangrove desa Mertajasah antara kepiting bakau, komunitas monyet ekor panjang, dan komunitas burung blekok.

Hasil Ground Check Berdasarkan Hasil Citra Satelit Sentinel 2A Periode 1 Januari - 31 Desember 2023, yang

telah diolah untuk mendapatkan nilai Indeks Kesehatan Mangrove sudah sesuai dengan kondisi mangrove eksisting. Mangrove yang ada di Desa Mertajasah didominasi memiliki tutupan jarang hingga sedang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pokmaswas Aman Sentosa didapatkan informasi terdapat sungai yang menghubungkan Desa Mertajasah hingga Desa Socah ditumbuhi oleh mangrove, hal itu

sudah sesuai dengan hasil pemetaan dimana muncul area mangrove yang memotong daratan diluar wilayah pesisir.

Berdasarkan hasil pengamatan Area mangrove di Desa Mertajasah dikelola oleh masyarakat secara lestari, Masyarakat memanfaatkan area mangrove untuk lokasi budidaya Lebah Madu, dan melakukan kegiatan pembibitan mangrove Jenis *Sonneratia alba* yang jarang dibudidayakan.(Adv)

## Tersangka Korupsi PT INKA, Kejati Jatim Tahan Budi Noviantara

**SURABAYA** - Kejati Jatim menetapkan mantan Direktur Utama PT INKA Budi Noviantara sebagai tersangka dugaan korupsi pembiayaan perusahaan afiliasi joint venture, The Sandy Group Infrastruktur (JV TSG INFRA) untuk megaproyek di Republik Demokratik Kongo (DRC). Dia ditahan di Rutan Kelas I Surabaya.

"Penyidik telah menahan Budi Noviantara selama 20 hari ke depan sejak 1 Oktober 2024 di Cabang Rutan Kelas I Surabaya," kata Mia Amiati, Kepala Kejati Jatim dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jatim, Selasa (1/10/2024).

Mia menegaskan proses hukum ini akan terus berlanjut menunggu hasil laporan perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

"Selain (eks) Dirut, ada kemungkinan 3 tersangka lain yang nanti akan kami pelajari. Ke-

ungkinan dari pihak-pihak luar yang bekerja sama dengannya," ujar Mia.

Dugaan korupsi melibatkan PT INKA ini mulai diselidiki Kejati Jatim sejak Juli 2024. Penyelidikan berfokus pada dugaan penyelewengan pembiayaan megaproyek transportasi dan infrastruktur di Republik Demokratik Kongo (DRC) diduga senilai Rp 167 triliun.

Berdasarkan hasil penyelidikan Kejati, pembiayaan yang dilakukan INKA terhadap JV TSG INFRA dialokasikan untuk membangun solar photovoltaic power plant berkapasitas 200 MW di Kinshasa, DRC.

Proyek itu merupakan bagian dari megaproyek Engineering Procurement and Construction (EPC) terkait transportasi dan infrastruktur kereta api di Kongo, yang membutuhkan sumber energi listrik sebagai penunjang utama.

"Kasus ini bermula pada Agustus 2019, ketika Direktur Utama PT INKA,

Budi Noviantara, melakukan pertemuan dengan beberapa pihak terkait proyek perkeretaapian di Republik Demokratik Kongo. Dari pertemuan ini, muncul dugaan penyelewengan dana dalam proyek itu," ungkap Mia Amiati.

Lebih lanjut, Mia menjelaskan bahwa Pada Maret 2020 atas permintaan salah satu pihak, Budi Noviantara memberikan uang sebesar Rp 2 miliar untuk biaya operasional terkait pertemuan itu.

Selanjutnya, PT INKA dan TSG Global Holding membentuk PT INKA Multi Solusi Trading (IMST) pada Februari 2020. Pembentukan perusahaan ini melanggar keputusan Menteri BUMN No SK-315/MBU/12/2019 soal penghentian sementara pendirian anak perusahaan atau perusahaan patungan di lingkungan BUMN.

"Beberapa transfer dana terkait proyek Kongo dilakukan oleh PT INKA,

seperti pada 25 September 2020 sebesar Rp 15 miliar ke rekening TSG Utama Indonesia dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 3,55 miliar kepada TSG Global Holding," ujar Mia.

Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bukti perbuatan Budi Noviantara selaku Dirut PT INKA melanggar hukum dan menyalahgunakan wewenang demi memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Mia menyatakan bahwa tindakan Budi itu menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 21,153 miliar dan \$265.300 USD, atau setara dengan Rp 3,979 miliar.

Kini Budi Noviantara akan dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan UU 20/2001, serta Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. (pra,ist/dya)

# Soroti Rendahnya Realisasi Belanja Triwulan III Pj Wali Kota Batu: Evaluasi Menyeluruh



Ilustrasi Penyerapan belanja daerah di Dinas PUPR Kota Batu. (Santi/Lenteratoday)

**BATU** - Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyoroti rendahnya realisasi belanja anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Triwulan III tahun 2024. Aries menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan optimalisasi kinerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Diketahui, hingga triwulan III ini, realisasi belanja APBD 2024 masih mencapai mencapai 47,6 persen dari target.

"APBD memiliki fungsi distribusi

yang sangat penting. Belanja pemerintah adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun, saat ini realisasinya masih jauh dari harapan. Ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh OPD," ujar Aries, Selasa (1/10/2024).

Aries menyebutkan, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu, hingga 30 September 2024, realisasi belanja APBD Kota Batu baru mencapai 47,6 persen atau sekitar Rp 616,646 miliar dari total target belanja sebesar Rp 1,295 triliun.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang terserap untuk pembangunan dan program-program pemerintah masih jauh dari target yang diharapkan.

"Realisasi belanja anggaran bukan hanya sekadar angka, tapi sangat relevan dengan kinerja kita. Jika belanja anggaran tidak optimal, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat yang seharusnya

mendapatkan manfaat dari program-program pemerintah," tegasnya.

Lebih lanjut, Aries mengingatkan saat ini telah memasuki Triwulan IV di tahun 2024 ini, yang artinya merupakan merupakan periode terakhir tahun anggaran 2024. Aries menegaskan, hal ini harus menjadi momentum bagi OPD untuk memaksimalkan waktu yang tersisa dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan sejak awal tahun.

Untuk itu, ia meminta agar para Kepala OPD dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja anggaran di masing-masing sektor. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan program, baik dari sisi administrasi, teknis, maupun implementasi di lapangan.

"Segera evaluasi dan identifikasi penyebab lambatnya realisasi anggaran. Apakah program belum dilaksanakan, tidak dapat dilaksanakan, atau masih dalam proses pelaksanaan," jelas Aries. (Santi/Dya)



APBD memiliki fungsi distribusi yang sangat penting. Belanja pemerintah adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun, saat ini realisasinya masih jauh dari harapan. Ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh OPD,"

**ARIES AGUNG PAEWAI**

Pj Wali Kota Batu,

## Waspada! Per September 2024

# Dinkes Kota Malang Catat 600 Kasus Demam Berdarah

**MALANG** - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang mencatat kasus demam berdarah dengue (DBD) mencapai 600

kasus hingga akhir September 2024 kemarin. Masyarakat diminta waspada dengan lebih proaktif dalam melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Malang, Meifta Eti Winindar, mengungkapkan angka ini menunjukkan peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun lalu, di mana kasus DBD tercatat sekitar 500 kasus hingga akhir Desember 2023.

"Dari Januari sampai September akhir 2024 kemarin, sudah ada 600 kasus. Kalau dibandingkan tahun lalu, kami ada sekitar 500an sekian kasus hingga Desember 2023. Makanya kami gencar untuk sosialisasi terkait pemberantasan sarang nyamuk," ujar Meifta, Selasa (1/10/2024).

Mengantisipasi masalah ini, Dinkes mengimbau masyarakat untuk lebih proaktif dalam melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan menjaga kebersihan lingkungan demi mencegah penyebaran penyakit.

"Tidak ada yang lain selain harus benar-benar kita jaga kebersihan rumah sendiri dan lingkungan. Pemberantasan sarang nyamuk

merupakan langkah yang sangat efektif dalam mencegah demam berdarah," paparnya.

Sebagai upaya konkret, Meifta menyampaikan, Dinkes Kota Malang mengimbau agar masyarakat rutin menguras tempat penampungan air, seperti bak mandi dan kolam, minimal satu kali dalam seminggu.

Selain langkah-langkah pencegahan, Meifta juga mengingatkan masyarakat untuk mengenali gejala DBD sejak dini agar dapat mendapatkan penanganan yang tepat.

"Kemudian juga mengenali secara dini gejalanya. Jangan terlambat untuk dibawa ke fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) ketika ditemukan gejala seperti panas, demam," jelasnya.

Dalam kesempatannya ini, Meifta juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan obat, terutama antibiotik. Ia menjelaskan, sangat penting untuk tidak membeli obat sendiri tanpa



Pemberantasan sarang nyamuk di Puskesmas Janti, Kota Malang. (dok. Puskesmas Janti)

rekomendasi dari dokter, terutama obat-obatan yang termasuk dalam kategori antibiotik.

Menurutnya, penggunaan obat yang tidak tepat dapat menimbulkan efek yang berbahaya bagi kesehatan. Misalnya, jika seseorang mengonsumsi antibiotik tanpa pengawasan medis dan tidak menghabiskan dosis yang ditentukan, hal ini dapat memicu terjadinya resistensi terhadap obat. (Santi/Dya)



Dari Januari sampai September akhir 2024 kemarin, sudah ada 600 kasus. Kalau dibandingkan tahun lalu, kami ada sekitar 500an sekian kasus hingga Desember 2023. Makanya kami gencar untuk sosialisasi terkait pemberantasan sarang nyamuk,"

**MEIFTA ETI WININDAR**

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Malang

# Sally Rooney, Penulis yang Vokal Dukong Pembebasan Palestina

**NAMA** Sally Rooney semakin berkibar di panggung sastra dunia. Pada 24 September 2024, penulis asal Irlandia itu merilis novel keempatnya, *Intermezzo*. Sebagai suara dari generasi millennial, Sally dikenal karena kemampuannya menggambarkan ketidakpastian ekonomi dan emosi yang menghantui anak muda. Novel debutnya, *Conversations With Friends* (2017), disusul *Normal People* (2018) dan *Beautiful World, Where Are You* (2021), telah membuatnya diakui sebagai penulis berbakat.

Dua novelnya bahkan telah diadaptasi menjadi serial televisi. *Conversations With Friends* tayang pada 2022, sementara *Normal People* tayang pada 2020. Dalam *Intermezzo*, Sally beralih dari protagonis perempuan yang biasa ia angkat dan memilih menjelajahi kehidupan dua saudara laki-laki—Ivan dan Peter—yang menghadapi duka setelah kematian ayah mereka. Ia mengeksplorasi tema kehilangan, penyesalan, dan refleksi diri.

## Sikap Politik dan Dukungan Sally Rooney untuk Palestina

Perhatian pada Sally tidak hanya soal karyanya. Ia mengklaim dirinya feminis dan marxis. Sikap politiknya—terutama dukungan terhadap Palestina, juga vokal disuarakan. Terbaru, dalam acara peluncuran *Intermezzo* di Southbank Centre, London, 26 September 2024, ia memulai dengan pidato terkait krisis di Palestina.

Sally menggambarkan kampanye militer terhadap Palestina sebagai ‘pembunuhan massal dan kehancuran struktural’. Ia bahkan mengkritik dukungan dari Uni Eropa dan Inggris. Sally menyoroti jumlah korban yang terus meningkat, lebih dari 40.000 jiwa telah tewas sejak 7 Oktober 2023, dan hampir 17.000 di antaranya adalah anak-anak. “Kita sedang menyaksikan genosida yang tengah berlangsung,” ujarnya.

Ia juga mengkritik perluasan aksi militer Israel ke Lebanon, menyebut bahwa kematian sipil di Palestina, Israel, dan Lebanon adalah tragedi besar yang memiliki akar dalam pendudukan ilegal Israel atas Palestina, dan sistem apartheid yang diterapkan terhadap rakyat Palestina. Pada 2021, Sally juga menolak tawaran penerbitan dalam bahasa Ibrani dari penerbit Israel untuk novel *Beautiful World, Where Are You*.

Penulis berusia 33 tahun itu menjelaskan bahwa penolakannya adalah bentuk dukungan terhadap gerakan Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) yang pro-Palestina. “Saya tidak dapat menerima kontrak baru dengan perusahaan Israel yang tidak secara tegas menjauhkan diri dari apartheid dan mendukung hak-hak rakyat Palestina yang ditetapkan oleh PBB,” ungkapnya.



*Saya tidak dapat menerima kontrak baru dengan perusahaan Israel yang tidak secara tegas menjauhkan diri dari apartheid dan mendukung hak-hak rakyat Palestina yang ditetapkan oleh PBB,”*

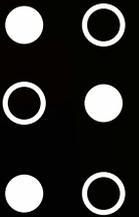
Sally Rooney, lahir pada 20 Februari 1991 di Castlebar, Irlandia, telah mencuri perhatian dunia sastra sejak debutnya dengan *Conversations with Friends* (2017). Latar belakang keluarganya—sang ayah bekerja di perusahaan telekomunikasi dan ibunya mengelola pusat seni—telah membentuk minatnya pada sastra sejak kecil. Setelah menempuh studi Sastra Inggris di Trinity College Dublin, Sally mulai menulis dengan serius.

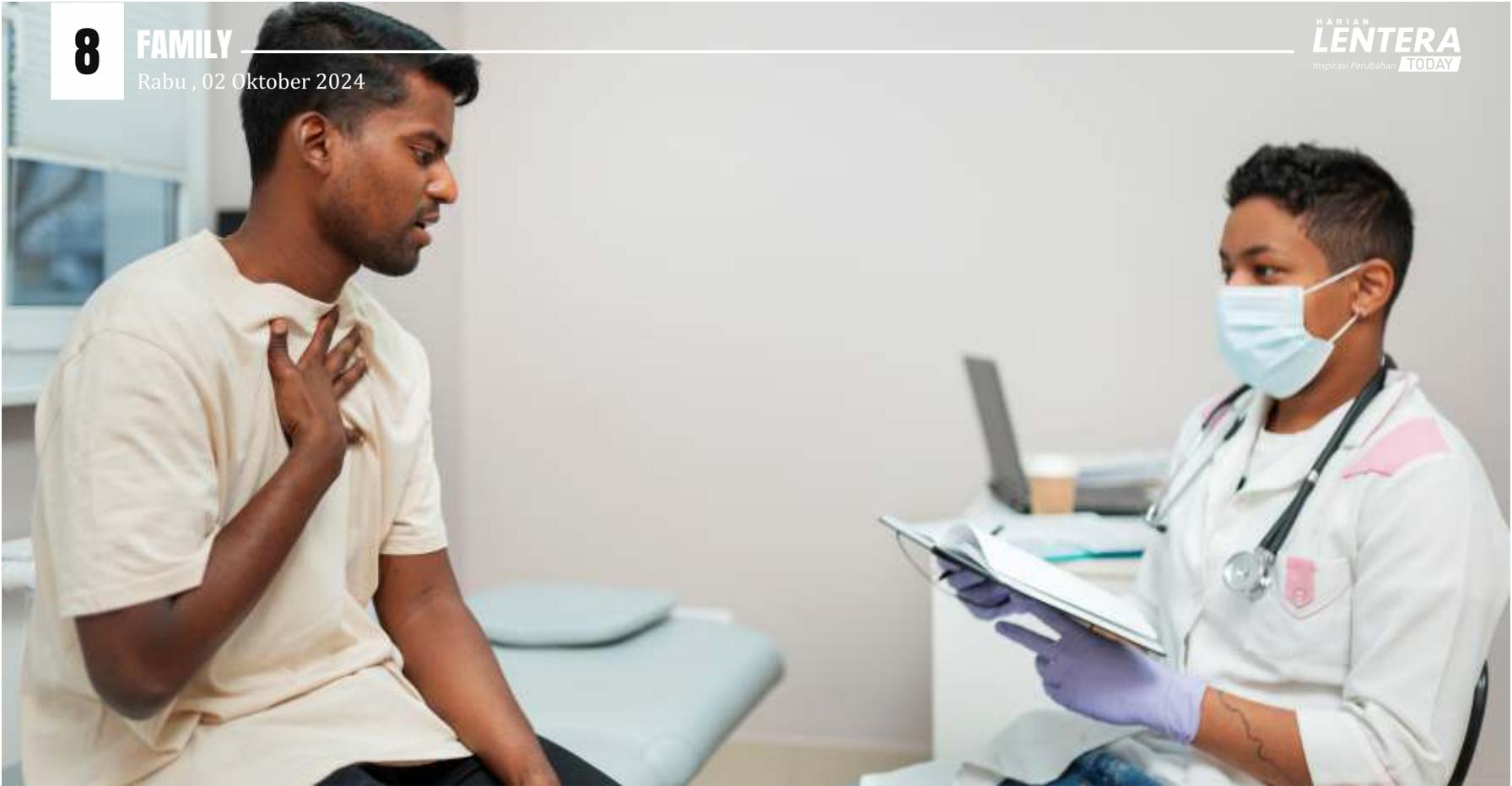
Gaya tulisannya yang minimalis, dialog cerdas, serta kemampuan menggali psikologi karakter muda yang kompleks membuatnya unik. Sikap politik Sally, yang menekankan keadilan sosial dan solidaritas, tercermin kuat dalam karyanya. Bagi dia, sastra adalah medium moral, bukan sekadar estetika.

## Kehidupan Awal Dan Pendidikan

Rooney lahir di Castlebar pada 1991, dan tumbuh besar di kota tersebut. Ayahnya bekerja untuk Telecom Éireann, sedangkan ibunya mengelola sebuah pusat seni; ia juga memiliki seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan. Rooney belajar bahasa Inggris di Trinity College Dublin dan menjadi sarjana pada 2011. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya, tetapi tidak menyelesaikan gelar master dalam bidang politik di universitas yang sama, melainkan menyelesaikan gelar dalam

sastra Amerika. Ia merupakan pembicara utama pada Kejuaraan Debat Universitas Eropa pada 2013. Sebelum menjadi penulis, ia bekerja di administrasi di salah satu restoran. (nei,ist/dya)





# Peran Penting Apotek dan Klinik Dalam Skrining Kesehatan

**KEMENTERIAN**Kesehatan meningkatkan upaya preventif melalui skrining kesehatan untuk deteksi dini penyakit kronis, terutama penyakit tidak menular. Dexa Group juga berkontribusi dengan menyediakan skrining kesehatan gratis di apotek dan klinik, yang mudah diakses masyarakat.

"Harapan kami, melalui program skrining kesehatan ini, Dexa Group dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit kronis, salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, hipertensi, kolesterol, diabetes plus asam urat," kata Direktur Utama DEXA Medica V.

Hery Sutanto dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada akhir September 2024.

Seperti dilansir laman resmi kedokteran, sebenarnya ada 4 alasan orang melakukan skrining kesehatan. Pertama adalah mencegah penyakit, adapula manfaat deteksi dini, memberikan pendidikan kesehatan, serta pemantauan kesehatan.

Pada kegiatan kali ini, DEXA Group menggandeng sebanyak 1.400 Apotek dan Klinik di Seluruh Indonesia, melalui kegiatan skrining kesehatan gratis (rapid test) bagi para pengunjungnya. Kegiatan ini dilakukan di 1.400 apotek dan klinik yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Palembang, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Program skrining ini sudah mulai berjalan sepanjang bulan Agustus dan

September 2024, yang merupakan rangkaian HUT DEXA Group yang ke-55.

Menurut data International Diabetes Federation (IDF) jumlah penderita diabetes di Indonesia sebanyak 19,5 juta penderita di tahun 2021 dan diprediksi akan menjadi 28,6 juta pada 2045.

Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi dunia. Karenanya dalam kerja sama tersebut, DEXA Group mendistribusikan sebanyak 115.000 strip tes gula darah dan asam urat ke lebih dari 1.400 relasi apotek dan klinik, berkolaborasi dengan Group K24, OGB DEXA, GoApotik, Assist.id, GPOS dan PT Anugrah Argon Medica (AAM).

PT Medela Potentia sebagai induk perusahaan AAM, melalui jaringan distribusi platform digitalnya turut berpartisipasi dalam kegiatan skrining kesehatan melalui jaringan GoApotik dan GPOS.

"Kami mendistribusikan alat tes kesehatan bekerja sama dengan 200 apotek jaringan GoApotik, serta 200 relasi apotek yang tergabung dalam jaringan GPOS," kata Direktur Utama PT Medela Potentia, Krestijanto Pandji.

Sementara itu Head of Digital Business & Channel Development AAM, Henry Setiawan Ongkojoyo mengemukakan bahwa GPOS memiliki keunggulan dalam menyediakan sistem operasional apotek berbasis

digital. "Mendukung layanan kesehatan melalui apotek, kami menyediakan sistem operasional dan manajemen apotek yang dibuat khusus untuk apotek agar dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan," kata Henry.

Apotek juga dapat menyediakan kebutuhan obat-obatan dengan lebih baik dan cepat. Harapannya dari 1.400 apotek yang bekerja sama untuk skrining kesehatan, dapat terus merasakan manfaat dari fitur dan layanan yang ada di GPOS," kata Henry.

Information Technology Director PT Medela Potentia, Cahyadi Suwindra Sugondo mengemukakan sesuai peranannya, GoApotik menyediakan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui platform online agar masyarakat mendapatkan akses obat dan produk kesehatan lainnya.

"Kehadiran kami dalam kegiatan tersebut, meningkatkan awareness GoApotik bahwa mendapatkan obat dan produk kesehatan saat ini bisa melalui platform online," katanya.

Selain apotek, peran klinik juga memberikan kontribusi pada kegiatan skrining ini, salah satunya melalui aplikasi Assist.id, penyedia Platform Clinic Information System dan RME terbesar di Indonesia.

"Assists.id sudah digunakan lebih dari 4.500 Klinik di seluruh Indonesia, dan Assist.id mengajak kolaborasi aktif seluruh klinik mendukung program skrining Pasien Diabetes dan Asam Urat. Untuk program ini kami

bekerja sama dengan klinik di Surabaya, Bandung, Semarang, dan Jabodetabek," kata ohamad Salahuddin, Chief Business Development Officer PT JAGA yang menaungi aplikasi Assist.id.

Manfaat akan kegiatan ini pun dirasakan oleh pemilik Klinik PB Sudirman Kota Mojokerto dokter Alfian Chandiardy. Alfian berharap kegiatannya bisa memberikan layanan sangat inovatif.

Ia pun mengapresiasi DEXA yang juga memiliki berbagai produk yang variatif dan bersifat pionir atau unggulan. "Mulai dari generik, OTC, dan ethical, bahkan melengkapi range produknya dengan kehadiran Obat Modern Asli Indonesia," katanya.

(nei,ist/dya)

“

*Harapan kami, melalui program skrining kesehatan ini, DEXA Group dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit kronis, salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, hipertensi, kolesterol, diabetes plus asam urat,"*

**Direktur Utama  
DEXA Medica V. Hery Sutanto**



# MENINGKATNYA PENETRASI INTERNET DIPREDIKSI PENGGUNA E-COMMERCE UMKM TERKEREK

**KALODATA**, platform analisa social commerce, menilai peningkatan penetrasi internet di Tanah Air akan mendorong pertumbuhan jumlah pengguna e-commerce untuk segmen pebisnis dan UMKM, yang berdampak pada platform analisa.

Diketahui, dalam 10 tahun terakhir penetrasi internet telah meningkat dari 38% menjadi 78% pada 2023. Angkat tersebut diproyeksikan tumbuh menjadi 86% pada 2030.

Sejalan dengan penetrasi internet yang tumbuh, jumlah UMKM dan pebisnis yang makin erat dengan e-commerce akan bertambah. Kalodata pun meyakini jumlah pelanggan mereka meningkat.

Kalodata merupakan platform analisa data e-commerce TikTok yang memungkinkan para pelaku bisnis, influencer, dan organisasi untuk

mengoptimalkan strategi konten dan perencanaan bisnis dengan memperoleh wawasan yang mereka dapat.

Co-founder dan COO Kalodata Lawrence Guo mengatakan Kalodata saat ini beroperasi di 8 negara yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Secara total jumlah pengguna mereka mencapai lebih dari 1 juta pengguna di seluruh dunia, dengan 300.000 diantaranya berada di Indonesia.

Guo optimistis Kalodata dapat merangkul lebih banyak pengguna tahun depan seiring dengan penetrasi internet di Indonesia yang makin luas.

"Potensi pertumbuhan pengguna Kalodata di Indonesia hingga 2 kali lipat pada 2025 sangat mungkin terjadi, mengikuti beberapa faktor seperti peningkatan penetrasi

internet, pertumbuhan UMKM dan bisnis online, serta makin meningkatnya kesadaran pelaku e-commerce akan pentingnya data untuk membuat keputusan yang lebih baik," kata Guo kepada Bisnis, Senin (30/9/2024).

Tidak hanya itu, lanjut Guo, untuk mengejar pertumbuhan tersebut Kalodata juga akan memperkuat kemitraan untuk memperluas jangkauan ke komunitas lokal. Kemudian, meningkatkan kesadaran pelaku ecommerce akan pentingnya data dengan melakukan edukasi, webinar, dan publikasi konten.

"Perusahaan juga menyesuaikan produk dan layanan kalodata agar lebih cocok untuk pasar Indonesia, serta selalu sadar dengan perkembangan teknologi terbaru termasuk di dalamnya mengadopsi

teknologi baru seperti AI," kata Guo.

Guo menuturkan Kalodata memiliki fitur chatbot kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan AI untuk bertanya mengenai strategi dan trending terbaru di TikTok. Perusahaan akan terus memperluas fitur AI tersebut sehingga lebih mumpuni dan tepat.

"Kami juga terus memperkuat tim Lokal agar dapat memberikan dukungan lebih baik kepada pengguna," kata Guo.

Guo mengatakan Kalodata belum lama menggelar Kalodata Indonesia Social Commerce Conference (KISCC) 2024, dengan tema "Unboxing E-commerce Excellence".

KISCC 2024 menyatukan edukasi teknis social commerce dengan analisis data algoritma untuk meraih hasil maksimal di TikTok Shop. (Ist)





# Motif Batik Larangan Keraton dengan Filosofi Mendalam

**BATIK** memiliki beragam motif yang melambangkan nilai-nilai budaya, sejarah, dan filosofi masyarakat. Setiap daerah di Indonesia juga memiliki ciri khas dan teknik pembuatan batik yang berbeda. Batik diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO pada tahun 2009, menjadikannya simbol identitas dan kebanggaan Indonesia.

Karena motifnya yang beragam dan cantik, batik sering dijadikan sebagai pilihan ketika berbusana formal, termasuk oleh kalangan bangsawan di Keraton Yogyakarta.

Namun, kalangan Keraton mengenal istilah motif batik larangan atau Awisan Dalem. Setiap Sultan di Keraton memiliki wewenang dan hak khusus untuk menetapkan motif batik larangan tersebut.

Setelah ditelisik, alasan pelarangan ini berkaitan erat dengan aturan-aturan yang memiliki filosofi mendalam, sehingga tidak semua orang bisa memakainya. Hanya kalangan Keraton lah yang bisa mengenakan motif batik eksklusif tersebut.

Lantas, apa saja motif batik larangan Keraton atau Awisan Dalem yang dimaksud? Simak selengkapnya dalam artikel ini, Ladies!

## Motif Batik Larangan Keraton

Merujuk pada jurnal bertajuk Batik Larangan di Keraton Yogyakarta pada Masa Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwana VII susunan Anna Galu Indreswari, berikut beberapa motif batik larangan Keraton yang memiliki nilai falsafah tinggi.

Motif Batik Larangan Keraton memiliki nilai filosofis dan sejarah yang mendalam, terutama dalam konteks budaya Keraton Yogyakarta. Berdasarkan jurnal

"Batik Larangan di Keraton Yogyakarta pada Masa Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwana VII" yang disusun oleh Anna Galu Indreswari, berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa motif batik larangan yang sarat dengan makna filosofis:

### 1. Motif Huk

Motif Huk merupakan salah satu jenis motif non-geometris yang kaya akan simbolisme. Motif ini terdiri dari berbagai elemen seperti kerang, binatang, tumbuhan, cakra, burung, dan sawat, yang masing-masing membawa makna tersendiri.

Kerang melambangkan dunia air, memberikan makna lapang hati dan kesediaan untuk menerima serta memahami segala keadaan.

Cakra adalah senjata dari Dewa Wisnu, yang melambangkan kekuatan pemeliharaan dan keseimbangan dunia. Binatang menjadi simbol dari sifat aman sentosa, melambangkan ketenangan, stabilitas, dan ketertiban.

Tumbuhan merepresentasikan kemakmuran, kesuburan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sawat, melambangkan ketabahan hati, keteguhan, dan kemampuan menghadapi tantangan dengan sikap yang kuat.

### 2. Motif Huk

pada batik Keraton adalah salah satu motif non-geometris yang memiliki elemen-elemen simbolik yang mendalam. Setiap unsur dalam motif ini memiliki makna yang terkait dengan kehidupan, alam, dan spiritualitas

### 3. Motif Kawung

Motif Kawung merupakan motif legendaris yang diyakini diciptakan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang memerintah Kerajaan Mataram pada tahun 1613-1645.

Dalam buku "Motif Batik Klasik Legendaris dan Turunannya" karya Adi Kusrianto, dijelaskan bahwa motif kawung terinspirasi dari bentuk buah aren atau kolong-kaling. Motif ini menyimpan filosofi yang erat kaitannya dengan konsep mandala dalam ajaran Buddha.

Konsep mandala menggambarkan keseimbangan kosmis yang dipandang sebagai representasi dari iman spiritual. Motif kawung juga dianggap sebagai simbol ketertiban, kebersihan hati, dan pengendalian diri, yang mencerminkan kemurnian batin.

### 4. Motif Udang Liris

Dalam buku "Memahami Busana Adat Keraton Yogyakarta: Warisan Penuh Makna" karya Mari Condronogoro, motif Udang Liris digambarkan sebagai motif geometris dengan pola lereng yang menyerupai rintik-rintik hujan.

Filosofi yang terkandung di

dalamnya berkaitan dengan hujan yang membawa kesuburan, yang memberi kehidupan pada tumbuhan dan ternak. Secara umum, motif ini melambangkan harapan

agar si pemakai dapat hidup dengan selamat, sejahtera, dan tabah. Motif Udang Liris juga mencerminkan tugas dan tanggung jawab pemakai dalam menunaikan kewajibannya demi kesejahteraan masyarakat dan bangsanya.

### 5. Motif Cemukiran

Dalam buku "Seni Kriya Nusantara" karya Dr. Deni Setiawan, dijelaskan bahwa motif Cemukiran berbentuk lidah api atau sinar. Api, sebagai salah satu unsur kehidupan, melambangkan keberanian, kesaktian, dan ambisi.

Motif ini dianggap sebagai representasi dari Dewa Syiwa, yang dianggap menjelma dalam diri raja. Oleh karena itu, motif ini hanya boleh digunakan oleh raja dan putra mahkota, yang dianggap sebagai titisan Dewa Syiwa.

Seorang raja harus memiliki kewibawaan, keberanian, kesaktian, serta ambisi untuk menyejahterakan rakyatnya. Motif ini mencerminkan semangat

kepemimpinan yang kuat dan tekad untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Dengan berbagai motif ini, batik larangan di Keraton Yogyakarta mencerminkan pandangan hidup yang kaya akan simbolisme dan makna filosofis. (Nei,ist/dya)

**Ekonomi Lesu Darah, ... (dari Hal 1)**

**BADAN** Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi deflasi lagi pada September, menjadi deflasi untuk bulan kelima beruntun. Deflasi pada September tercatat 0,12%, lebih dalam ketimbang bulan sebelumnya dan jauh lebih dalam ketimbang prediksi para ekonom.

Sementara Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan lalu tercatat di angka 1,84% year-on-year, menjadi pertama kali sejak Desember 2021 inflasi RI ada di bawah 2%.

"Inflasi September adalah yang terendah sejak Desember 2021 dengan inflasi tahunan sebelumnya pada November 2021 di angka 1,75%," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widayanti, Selasa (1/10/2024).

Dengan deflasi bulanan yang masih berlanjut, mendekati rekor terpanjang yang pernah terjadi pada era krisis moneter 1997-1999 silam saat deflasi terjadi tujuh bulan beruntun, menjadi pertanyaan apakah ekonomi RI baik-baik saja? Selain itu, tingkat inflasi tahunan juga turun ke level terendah sejak 2021 ketika ekonomi domestik masih dibekap krisis akibat pandemi Covid-19 yang membuat banyak usaha rakyat gulung tikar.

Deflasi menunjuk pada penurunan harga barang dan jasa secara umum. BPS telah berulang kali menampak terjadinya deflasi yang beruntun adalah karena kemerosotan daya beli masyarakat. Penyebab deflasi yang panjang tahun ini menurut pemerintah lebih karena sisi suplai yang melimpah sehingga harga bergerak turun.

"Andil deflasi utamanya disumbang penurunan harga pangan, seperti produk tnaman pangan, hortikultura terutama yang berkaitan dengan cabai merah dan tomat. Juga produk peternakan daging ayam ras, yang sebelumnya harganya meningkat sekarang kembali stabil," kata Amalia.

Deflasi, lanjut Amalia, sering terjadi saat masa panen. Pasokan yang melimpah membuat harga di tingkat konsumen untuk turun.

"Penurunan harga ini dipengaruhi mekanisme pembentukan harga di pasar, terutama dari sisi penawaran. Sehingga harga yang diterima konsumen relatif turun karena limpahan pasokan karena panen ataupun turunnya ongkos produksi," tegas Amalia.

Bagaimana dengan gejala penurunan daya beli rakyat? Untuk mengambil kesimpulan ada indikasi daya beli masyarakat menurun harus ada studi lebih lanjut. Sebab, penurunan daya beli tidak bisa hanya dimonitor atau diambil kesimpulan hanya dengan angka inflasi," kata Amalia.

Selain itu, pada September, inflasi inti yang kerap dilihat sebagai salah satu ukuran permintaan dalam ekonomi mencatat kenaikan di 2,09%, tertinggi sejak Agustus 2023.

Inflasi secara tahunan pada September adalah karena kenaikan sebagian besar komponen

pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,57%, lalu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,18%, disusul oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,60%, lalu kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,08%.

Kelompok kesehatan bahkan masih mencatat inflasi 1,69% dan kelompok transportasi 0,92%. Sedangkan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mencatat inflasi 1,55%, kelompok pendidikan sebesar 1,94%.

Dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran inflasinya 2,25%. Sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tercatat inflasi 6,25%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,28%.

**PHK Tinggi, Pendapatan Rendah**

Kendati BPS menunjuk penyebab deflasi adalah karena penurunan harga beberapa komoditas pangan bergejolak karena panen, tapi terjadinya deflasi hingga lima bulan beruntun menuai tanya di tengah kondisi manufaktur terkontraksi lagi untuk bulan ketiga dan gelombang PHK yang masih besar.

S&P Global melaporkan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia pada September bernilai 49,2. Sedikit naik dibandingkan Agustus yang sebesar 48,9, namun masih berada di zona kontraksi.

"PMI memberikan sinyal laju kontraksi sedikit lebih melambat," tulis keterangan S&P.

PMI manufaktur Indonesia sudah berada di area kontraksi selama 3 bulan beruntun.

"Kondisi operasional manufaktur masih menurun pada September, tercermin dari penurunan produksi dan pemesanan baru (new orders). Inventori di gudang dan barang jadi meningkat. Sementara pelaku industri menurunkan pembelian

bahan baku," ungkap S&P.

Pelaku usaha, lanjut keterangan S&P, menilai permintaan masih lemah dan aktivitas klien menurun dibandingkan awal tahun ini. Sedangkan permintaan manufaktur di luar negeri masih menjadi beban. Bisnis ekspor turun 7 bulan beruntun ke posisi terendah sejak November 2022. Pembelian bahan baku pun menurun, kini sudah 3 bulan beruntun. Jika dimungkinkan, pelaku usaha memilih untuk menggunakan barang yang sudah ada.

Sementara itu, pada kesempatan sebelumnya Kementerian Tenaga Kerja melaporkan jumlah PHK selama Januari-Agustus 2024 mencapai 46.240 orang tenaga kerja. Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah yaitu sekitar 31,82 persen dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.

Jumlah PHK selama delapan bulan terakhir tahun ini, naik 23,7% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Ekonom meyakini deflasi lima bulan beruntun pada Mei—September 2024 karena pelemahan daya beli masyarakat atau tekanan di sisi permintaan. Kendati demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan tren deflasi belakangan terjadi karena biaya produksi pangan turun atau faktor di sisi penawaran.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan, deflasi selama berbulan-bulan hanya terjadi ketika kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Deflasi berbulan-bulan, sambungnya, merupakan anomali dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di atas 5%.

"Deflasi lima bulan berurut-urut itu mengkhawatirkan menurut saya, karena kalau dalam kondisi normal ini tidak terjadi untuk negara dengan tingkat pertumbuhan seperti di Indonesia yang 5%," ujar Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaskan, notabene deflasi terjadi karena lemahnya tingkat permintaan. Dalam konteks Indonesia belakangan, dia meyakini pendapatan masyarakat semakin

melemah. Menurutnya, pendapatan masyarakat saat ini lebih rendah dibandingkan pra pandemi. Selain itu, banyak orang yang belum bisa kembali bekerja usai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) saat masa pandemi.

"Ini mempengaruhi dari tingkat spending mereka sehingga spending itu relatif melemah terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah," jelas Faisal.

Dia pun mengingatkan, kelas menengah merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi terutama karena menjadi kelompok penduduk yang mengontribusikan konsumsi terbesar. Sementara itu, konsumsi rumah tangga menjadi kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

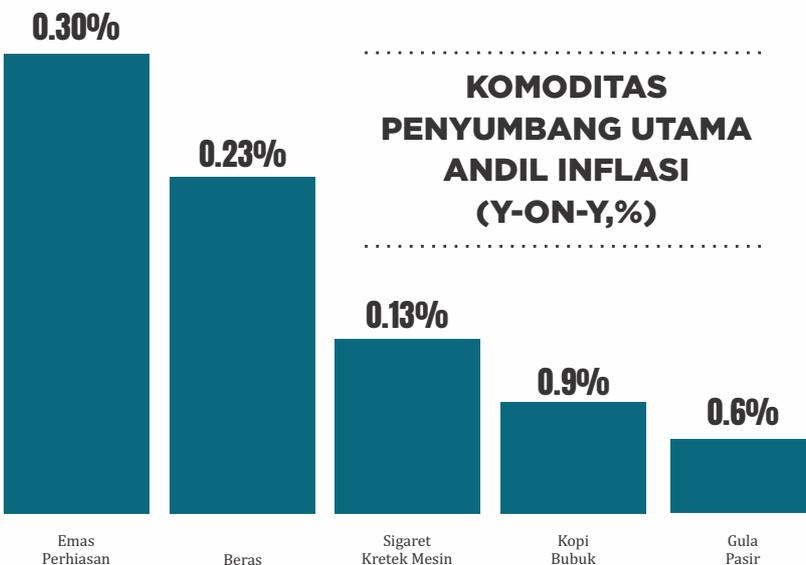
Oleh sebab itu, jika konsumsi kelas menengah melemah maka perekonomian juga tidak akan bergerak seperti pelemahan industri manufaktur dan sektor jasa-jasa. Dia mendorong agar pemerintah bergerak cepat untuk atasi pelemahan daya beli tersebut.

"Ini yang perlu menjadi catatan. Artinya perlu menyikapi secara tepat kondisi ini, insentif bukan hanya dalam hal pelonggaran moneter tapi juga kebijakan insentif di fiskal dan di sektor riil," kata Faisal.

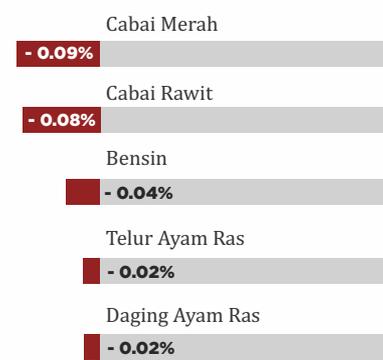
Sementara itu, ekonom Core Yusuf Rendy Manilet menyoroti angka inflasi inti sebesar 0,16% pada September 2024 secara bulanan (month to month/MtM). Dia mengungkapkan, angka tersebut mirip dengan inflasi inti ketika terjadi proses pemulihan pandemi pada 2020—2021.

Selain itu, dia menyoroti indeks keyakinan konsumen pada Agustus. Meski secara umum keyakinan konsumen mengalami peningkatan namun berdasarkan kelompok pengeluaran (Rp4,1 juta—5 juta) ataupun penghasilan (Rp3,1 juta—4 juta) cenderung rendah.

"Pertumbuhannya juga relatif kecil hanya mencapai 0,7% secara bulanan. Artinya memang kelompok kelas menengah relatif tertekan untuk melakukan konsumsi," jelas Yusuf, Selasa (1/10/2024). (wid,rls, bis,ktn/dya)



**KOMODITAS PENYUMBANG UTAMA ANDIL DEFLASI (M-TO-M,%)**



*Penghargaan Kementerian Kelautan dan Perikanan*

# 2 Pelabuhan Perikanan di Jatim Raih Kategori Teladan dan Terbaik



Alhamdulillah penghargaan ini sebagai vitamin tambahan bagi DKP Jatim untuk terus memberi layanan terbaik ke masyarakat di Jawa Timur."

**ISA ANSHORI**

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur

**SURABAYA**-Pemprov Jatim kembali menorehkan prestasj. Kali ini giliran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur melalui UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan dan Muncar Banyuwangi meraih penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan meraih juara 1 dalam kategori Pelabuhan Perikanan Teladan dan Terbaik. Penghargaan bergengsi ini didasarkan pada Keputusan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 63/PERMEN-KP/2018 tentang pedoman pelaksanaan pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari bagi unit kerja pelayanan

yang berprestasi di bidang kelautan dan perikanan.

Selain Pelabuhan Mayangan, KKP juga memberi penghargaan ke UPT Pelabuhan Perikanan Muncar Banyuwangi sebagai juara 3 Pelabuhan Perikanan Teladan dan Terbaik.

Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono yang diwakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur, Isa Anshori mengatakan UPT Pelabuhan Mayangan merupakan salah satu pelabuhan ikan terbesar di Jawa Timur. Pelabuhan ini juga menjadi jujukan bagi nelayan mengeksport hasil laut Jawa Timur ke berbagai negara.

"Alhamdulillah penghargaan ini sebagai vitamin tambahan bagi DKP Jatim untuk terus memberi layanan terbaik ke masyarakat di Jawa Timur," kata Isa dalam keterangannya, Minggu (29/9/2024).

"UPT Pelabuhan Mayangan juga UPT Pelabuhan Muncar ini salah satu pelabuhan ikan terbesar di Jatim. Kami akan selalu berkomitmen memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat," tambahnya.

Isa menyebut penghargaan tersebut diberikan kepada unit kerja yang menunjukkan kinerja optimal dalam berbagai aspek. Termasuk pelayanan, manajemen pelabuhan, inovasi, dan kontribusi terhadap

kesejahteraan nelayan serta keberlanjutan sumber daya laut.

"Aspek-aspek yang dinilai dalam penghargaan ini mencakup, Efektivitas Pelayanan, Inovasi dalam Pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana, Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Penerapan Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan, termasuk pengelolaan limbah dan keberlanjutan ekosistem laut," jelasnya.

"Ke depan kami akan optimalkan juga kawasan wisata di Pelabuhan Mayangan mulai wisata bahari, wisata paramotor, dan wisata anak-anak," tandasnya.(Adv)

## Izin Tambang Ormas Keagamaan Digugat ke MA

**JAKARTA**-Sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang mengajukan gugatan permohonan judicial review atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terkait pemberian prioritas izin tambang bagi ormas keagamaan ke Mahkamah Agung (MA). Menurut para Pemohon, pemberian izin tambang tanpa lelang menyalahi UU Minerba.

Tim Advokasi Tolak Tambang menilai bahwa gugatan ini diajukan lantaran aturan tersebut dianggap cacat secara hukum dan berpotensi menjadi sarana transaksi politik.

Menurut para Pemohon, pemberian izin tambang tanpa lelang jelas menyalahi Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Alih-alih mengurus tambang, Tim

Advokasi meminta ormas keagamaan memilih tetap fokus pada pembinaan dan pelayanan umat.

Perwakilan kuasa hukum para Pemohon, M. Raziv Barokah, menekankan bahwa ormas keagamaan perlu diselamatkan dari urusan pertambangan.

"Karena kalau dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk ke depannya di mana lahan tambang akan selalu dijadikan alat transaksi untuk pembungkaman politik oleh pemerintah," ujar dia dalam keterangan persnya kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).

"Ke depannya, bisa jadi giliran ormas-ormas yang lain, seperti ormas di bidang industri, profesi, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, Tim Advokasi Tolak Tambang, akan terus mengawal perjuangan ini," sambungnya.

Tak hanya itu, para Pemohon menilai bahwa pemberian izin tambang bagi ormas tak hanya sekadar memperparah kerusakan lingkungan. Namun, juga akan berimplikasi pada konflik dan gesekan di tengah masyarakat. Terlebih, hal itu juga akan berkaitan dengan masyarakat adat.

Oleh karenanya, mereka menilai bahwa pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan justru kebijakan yang tak sejalan dengan visi menyejahterakan umat yang kerap digaungkan oleh ormas keagamaan.

"Hal ini bertentangan dengan Teologi al-Maun Hijau Muhammadiyah, yang mengutamakan perlindungan lingkungan dan menolak ekstraktivisme, sesuai dengan prinsip Dar'ul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalih, di mana mencegah keburukan dan kerusakan harus

didahulukan daripada mengejar manfaat dan keuntungan," ucap Kepala Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam LHKP Muhammadiyah, Wahyu Agung Perdana, yang juga menjadi Pemohon dalam gugatan itu.

Lewat gugatan itu, Tim Advokasi Tolak Tambang pun meminta MA dapat mengabulkan permohonan mereka seluruhnya dan menuntut ormas keagamaan untuk tidak terlibat dalam kegiatan bisnis pertambangan.

"Serta berharap bahwa ormas keagamaan dapat kembali kepada tujuan semula masing-masing ormas, yakni untuk membina dan memberikan perlindungan umat," tutupnya. Adapun sebanyak 18 Pemohon yang terdiri dari 6 pihak kelembagaan dan 12 perorangan mengajukan gugatan judicial review ke MA hari ini, Selasa (1/10/2024). (wid,rla,ant/dya)